



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau informasi yang terdapat dalam publikasi ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Untuk lebih jelasnya mengenai hak cipta, silakan hubungi bagian hukum atau kepegawaian. Untuk penyalinan atau penggunaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan primer perusahaan tidak hanya untuk mencari keuntungan, namun juga agar perusahaan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat termasuk konsumen, karyawan, masyarakat serta lingkungan yang terkait dengan manajemen dan pemegang saham. Artinya perusahaan wajib menjaga hubungan baik menggunakan *stakeholders*, terutama dalam hal penyediaan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan operasional. Pemahaman ini mendorong masyarakat untuk berharap bahwa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan tidak terbatas di aspek kinerja atau *single bottom line*, tetapi juga mencakup indikator keseluruhan, kinerja keberlanjutan atau *triple bottom lines* yaitu kinerja ekonomi, sosial, serta lingkungan (Hardi, 2018). Berdasarkan Emil Salim, pembangunan berkelanjutan artinya suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya insan dengan menyelaraskan keduanya pada pembangunan (Mubarok, 2018). Ketika menerapkan konsep *triple bottom line*, perusahaan perlu memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

CSR adalah sebuah konsep yang bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan pada seluruh aspek perusahaan (termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajemen, karyawan, konsumen, dan lingkungan) (Hardi & Chairina, 2019). Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan ialah untuk memenuhi harapan *stakeholders*, karena dukungan *stakeholders* akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan wajib menunjukkan kinerja terbaiknya agar bisa memperoleh dukungan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Faktanya, perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan melalui berbagai media, yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Dalam laporan tahunan,



isu sosial serta lingkungan dan laporan keuangan serta laporan kinerja manajemen akan diungkapkan. Namun, pada laporan keberlanjutan atau yang biasa dianggap dengan laporan keberlanjutan, laporan tersebut memberikan gambaran yang seimbang dan lumrah dalam wacana kinerja keberlanjutan perusahaan, termasuk kontribusi positif dan negatif perusahaan selama periode waktu tertentu (Ningsih & Cheisviyanny, 2019).

Tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan pada *stakeholders* menggunakan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan. Dokumen No. 47 tahun 2012, setiap perusahaan atau entitas mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. UU RI No. 40 tahun 2007 perihal perseroan terbatas, Pasal 66 ayat 2c mengatur bahwa laporan tahunan perusahaan wajib memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Tidak hanya Pasal 66, Pasal 74 ayat 1 pula mengatur bahwa perusahaan yang melakukan perjuangan di bidang sumber daya alam atau perusahaan yang terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Tiga macam konsep pengungkapan umumnya dikedepankan, yaitu pengungkapan yg benar, adil, dan lengkap. Pengungkapan penuh meliputi pengungkapan minimum yang diharapkan untuk menghindari laporan keuangan yang menyesatkan. Bila kita melihat eksistensi perusahaan yang sebenarnya, selain menyebabkan biaya sosial juga dapat membawa manfaat sosial. Manfaat sosial artinya kontribusi atau manfaat positif berasal kelangsungan hidup perusahaan kepada masyarakat.

Pada tahun 1978, promosi kesadaran publik akan pentingnya aspek lingkungan dan sosial, di antaranya *Our Common Future*, juga dikenal sebagai Laporan Brundtland, adalah laporan tahun 1987 dari *United Nations World Commission on Environment and Development* (WCED) (UN). Pada tahun 2016, istilah "pembangunan berkelanjutan" atau "pembangunan berkelanjutan" mulai



dikenal luas di seluruh dunia. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai kelangsungan hidup masyarakat saat ini tanpa mengancam kelangsungan hidup generasi mendatang, dengan memperhatikan semua aspek masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa cara berpikir telah berubah dari *single bottom line* menjadi *triple bottom line* (Anindita, 2013).

Perusahaan Indonesia secara keseluruhan menggunakan standar GRI (standar GRI) untuk melaporkan laporan ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka kepada publik. Laporan yang menggunakan standar ini dapat memberikan informasi positif atau negatif tentang keberlanjutan organisasi. Standar ini berfokus pada aspek-aspek kunci dari keterbukaan informasi. Pelaporan sesuai dengan standar GRI memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah utama perusahaan, dampak terkait, dan cara mengelola dampak tersebut. Setiap perusahaan dapat menggunakan beberapa atau semua standar GRI untuk menyiapkan laporan keberlanjutan (GRI, 2016).

Kasus-kasus seperti Lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, pencemaran di Teluk Minahasabuyat, dan pelabuhan bebas Papua telah membuat para pebisnis dan masyarakat umum melihat pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan saat ini perlu melakukan operasi bisnis yang beretika pada isu-isu sosial dan lingkungan sehingga mereka tidak hanya dapat mempertimbangkan masa kini tetapi juga masa depan dalam menjalankan bisnisnya, guna mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Pedoman *Global Reporting Initiative* menunjukkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.



Salah satu kriteria untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan adalah dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan. Laporan Keberlanjutan adalah laporan yang dibuat setiap tahun, yang menunjukkan dampak positif dan negatif organisasi terhadap lingkungan, masyarakat dan ekonomi (Astini et al., 2017). Standar yang digunakan untuk menyiapkan laporan keberlanjutan adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*. *Global Reporting Initiative* mendefinisikan pelaporan keberlanjutan sebagai sistem pelaporan yang memungkinkan semua perusahaan dan organisasi untuk mengukur, memahami, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi, lingkungan, dan sosial, yaitu bagaimana pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanggung jawab atas kinerja organisasi.

Laporan keberlanjutan memberikan manfaat fisik dan tidak berwujud bagi perusahaan pelapor. Manfaat tidak berwujud seperti motivasi dan loyalitas karyawan, serta peningkatan reputasi merupakan manfaat yang sudah dikenal masyarakat sejak lama, namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa nilai pengungkapan juga tercermin dalam kinerja keuangan perusahaan.

Manfaat utama dari laporan keberlanjutan perusahaan adalah keuntungan finansial, manajemen risiko, loyalitas karyawan, reputasi konsumen, dan kepercayaan serta manfaat sosial. Ini adalah laporan yang disusun bersama oleh Ernst & Young (EY) dan dikisahkan oleh *Boston College Corporate Citizenship Center*. Laporan keberlanjutan juga memungkinkan perusahaan untuk menyediakan pengungkapan keberlanjutan yang hemat biaya, membandingkan kinerja dengan pesaing, fokus pada upaya untuk meningkatkan kinerja pada masalah keberlanjutan, dan memberikan kemungkinan kepada investor. Penilaian risiko dan peluang untuk pengembangan berkelanjutan (Aryal, 2017).

Penyusunan laporan keberlanjutan harus mengacu pada pedoman pelaporan yang terstandarisasi. Standar pelaporan keberlanjutan yang disusun oleh GRI telah menjadi acuan



umum bagi banyak perusahaan di Indonesia, yaitu standar GRI. Menurut Kartawijaya yang dikutip oleh (Anggraeni & Djakman, 2018), GRI dianggap sebagai pedoman yang lengkap dan terpercaya karena telah dipublikasikan secara global dan didukung oleh struktur pelaporan yang mewakili kepentingan semua pihak. GRI mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai sistem pelaporan yang memungkinkan semua perusahaan dan organisasi untuk mengukur, memahami dan mengkomunikasikan informasi ekonomi, lingkungan dan sosial, yaitu bagaimana pemangku kepentingan internal dan eksternal dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tanggung jawab atas kinerja organisasi.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial yang diungkapkan dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tanggung jawab, tanggung jawab dan transparansi perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan lainnya (Machmud & Djakman, 2010). Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki konsep keberlanjutan dalam memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Konsep keberlanjutan ini membutuhkan kerangka kerja global dengan bahasa yang konsisten dengan tujuan dan terukur, sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Konsep ini adalah yang kemudian dikenal dengan *Sustainability Report* (Widianto & Prastiwi, 2011). Laporan Keberlanjutan membuktikan bahwa perusahaan dan komitmen sosial dan lingkungannya dapat dievaluasi oleh pihak yang membutuhkan informasi. Selain itu, Laporan Keberlanjutan adalah salah satu dari alat yang dapat digunakan organisasi, pemerintah, dan perusahaan untuk berdialog dengan warga atau pemangku kepentingan, sebagai salah satu dari upaya implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan yang disusun saat ini menempati posisi, sama pentingnya dengan, dan informasi diungkapkan dalam laporan keuangan (Nasir et al., 2014)



Pada masa ini, penelitian dengan topik pengungkapan *indicator* dalam laporan keberlanjutan semakin banyak dilakukan. Contohnya yang dilakukan oleh (Pasaribu & Wardhani, 2015) melakukan analisis komparatif beberapa perusahaan tambang di Indonesia salah satunya adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC) berdasarkan kepatuhan terhadap GRI. Penelitian (Atmajaya, 2015) menganalisis sejauh mana PT. Kaltim Prima Coal (KPC) mengungkapkan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan keberlanjutan perusahaan sesuai dengan GRI. Namun pada penelitian ini didasarkan pada pedoman pelaporan GRI *Standards* 2018 yang berupa modul. Perubahan bentuk modul membuat pedoman GRI lebih fleksibel dalam melakukan revisi, mengubah, serta menambah, dan mengurangi topik tertentu yang dituju/relevan serta lebih transparan penerapannya oleh pengguna. Pada penelitian kali ini, ada penambahan penelitian yang akan dibahas yaitu PT. Elnusa, Tbk yang masih sangat jarang diteliti dan dibahas.

PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Elnusa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dengan skala global yang pada tahun 2018 telah menggunakan GRI *Standards* sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keberlanjutan, serta belum di audit secara eksternal. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai

“Analisis Kepatuhan *Sustainability Report* Terhadap Standar GRI pada PT. Kaltim Prima Coal Dan PT. Elnusa Tahun 2018”.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan, maka ditemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah Laporan Keberlanjutan PT Kaltim Prima Coal (KPC) sesuai dengan GRI Standards?



2. Apakah Laporan Keberlanjutan PT EL NUSA sesuai dengan GRI Standards?
3. Apakah tingkat kepatuhan PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Elnusa sudah sesuai dengan GRI Standards?
4. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Elnusa, Tbk terhadap GRI Standards?
5. Apakah PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Elnusa, Tbk sudah melakukan pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam Sustainability Report dengan baik?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah di atas, agar penelitian dapat dilakukan dengan lebih fokus, maka penelitain ini membatasi masalah yang lebih diteliti sebagai berikut :

1. Apakah tingkat kepatuhan PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Elnusa sudah sesuai dengan GRI Standards?
2. Sampai sejauh mana tingkat kepatuhan pengungkapan Sustainability Report yang terkait dengan standar sudah sesuai dengan kriteria GRI ?

D. Batasan Penelitian

Agar penelitian menjadi lebih terpusat dalam proses pengumpulan data dan analisis data, maka pembahasan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Rentang waktu data yang digunakan merupakan data tahun 2018
2. Objek penelitian merupakan perusahaan dalam bidang pertambangan yang di ambil dari *website Sustainability Report* PT. Kaltim Prima Coal dan PT. Elnusa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Unit analisis penelitian ini menggunakan data sekunder yang di ambil dari *website Sustainability Report* masing-masing perusahaan.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian merumuskan masalah menjadi: “Bagaimana tingkat kepatuhan pengungkapan *Sustainability Report* sudah sesuai dengan standar GRI?”

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk peneliti, penelitian ini sebagai pembelajaran serta pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pedoman untuk melakukan praktik pengungkapan *Sustainability Report* serta menyadari pentingnya mengungkapkannya serta kepatuhan terhadap standar bagi pengguna dan pengambil keputusan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya terutama dalam pembahasan tentang pengungkapan *Sustainability Report*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.